



Banyak Aset Pemkab Kapuas Hulu Jadi Temuan BPK

Borneo Tribune, Putussibau Upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum tercapai, saat ini BPK hanya bisa memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), salah satu penyebabnya yaitu masalah banyak aset Pemerintah Daerah yang tidak memiliki nilai perolehan dan belum jelas sehingga banyak aset yang menjadi temuan BPK. Hal ini diungkapkan Kepala

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kapuas Hulu, Mohd. Zaini mengungkapkan Borneo Tribune, Rabu (25/06). Menurutinya, rata-rata yang mendapat temuan masalah aset dan penanaman modal pada Badan Usaha Milik Daerah seperti penyertaan modal pada PDAM dan PD. Ucak Kapuas. Namun untuk aset pemerintahan lebih banyak pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan, ter-

utama untuk tanah dan bangunan serta hibah yang belum terdata dan belum memiliki nilai perolehan. Dikatakan Zaini, ditargetkan tahun semua aset sudah jelas perolehannya, sehingga Kapuas Hulu bisa mendapatkan WTP dari BPK. "Terkadang data itu sudah ada tetapi tidak diakui oleh BPK karena dasarnya harus ada sertifikat dan agar ada perolehan nilai, DPPKAD harus menginput alisir aset daerah sementara berbicara aset tidak terlepas dari peran

dan dukungan masing-masing SKPD," ujarnya.

Sehingga saat ini untuk menindaklanjuti hal tersebut dilaksanakan Rekonsiliasi Aset Tetap Semester I tahun 2014 yang diikuti seluruh SKPD. Bahakn menurutnya Bupati Kapuas Hulu juga menekankan agar untuk hasil perolehan aset 0 atau 1 harus tersaji tahun 2014, tidak ada aset yang tumpang tindih, dan pendataan barang-barang mutasi harus jelas.

(Timo)